

**PENGARUH AUDIT *TENURE*, ROTASI AUDIT, KOMITE
AUDIT, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI
BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA 2011-2018**

SKRIPSI

DEWI OKTAVIANI

NIM. 13622313



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN

TANJUNGPINANG

2020

**PENGARUH AUDIT *TENURE*, ROTASI AUDIT, KOMITE
AUDIT, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI
BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA 2011-2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh :

DEWI OKTAVIANI

NIM. 13622313

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN

TANJUNGPINANG

2020

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH AUDIT *TENURE*, ROTASI AUDIT, KOMITE AUDIT,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA 2011-2018**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

DEWI OKTAVIANI

NIM. 13622313

Menyetujui:

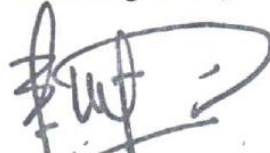
Pembimbing Pertama,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.

NIDN. 1015069101 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Charly Marlinda, SE, M.Ak.Ak.CA

NIDN. 1029127801 / Lektor

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.

NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH AUDIT *TENURE*, ROTASI AUDIT, KOMITE AUDIT,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA 2011-2018**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

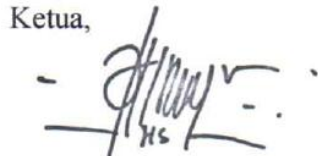
DEWI OKTAVIANI

NIM. 13622313

Telah di Pertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian
Pada Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

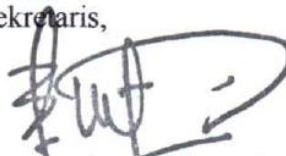
Ketua,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.

NIDN. 1015069101/Lektor

Sekretaris,



Charly Marlinda, SE, M.Ak.Ak.CA

NIDN. 1029127801/Lektor

Anggota,



Masvifah As Sahara, S.E., M.Si,

NIDN. 1010109101 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, Januari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,



Ketua,

Charly Marlinda, SE, M.Ak.Ak.CA

NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : DEWI OKTAVIANI
NIM : 13622313
Tahun Angkatan : 2013
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.14
Program Studi : S1- Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Audit *Tenure*, Rotasi Audit, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2011-2018.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Januari 2020

Penyusun,



DEWI OKTAVIANI

NIM. 13622313

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Segala sembah sujud serta puji dan syukurku pada-
tfu Allah SWT atas rahmat serta karunia yang
telah diberikan.*

*Dengan Ridho-Nya, skripsi ini saya persembahkan
untuk Ibuku tercinta (Sumiyati) dan Ayahku (Tfuh
Tang) yang telah bersusah payah mendidik dan
berjuang agar saya bisa menyelesaikan pendidikan
saya dengan baik.*

*Terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan
dan pengorbanan yang telah diberikan dan tidak
ternilai oleh apapun serta doa yang tulus yang selalu
dipanjatkan selama ini.*

HALAMAN MOTTO



“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. ”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

“ Pendidikan mempunyai akar yang pahit,tapi buahnya manis. ”

(Aristoteles)

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia "

(Nelson Mandela)

“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya, yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Skripsi ini berjudul **“PENGARUH AUDIT *TENURE*, ROTASI AUDIT, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2011-2018”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan semua pihak serta bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materil, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE, M.Ak.Ak.CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan selaku Dosen Pembimbing II.
2. Ibu Ranti Utami, SE, M.Si.Ak.CA, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE, Ak.,M.Si.,CA, selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

4. Bapak Imran Ilyas,MM,. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE, M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan selaku Dosen Pembimbing I.
6. Ibu Masyitah As Sahara, SE,M.Ak., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
7. Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan seluruh staf kampus di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
8. Kakakku Desi Armita, terima kasih telah membantu saya dan mendukung saya serta memberikan semangat agar skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Piter dan Ibu Silla, selaku atasan saya dan rekan kerja saya di PT. Malaka Abadi terimakasih atas doa dan dukunganya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu indri yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungannya selama ini
11. Sahabat-sahabatku, Rani, Ratih, Anggi Riskianci, Maria, Febriani D.K dan Ani Fidya dan semuanya terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan serta menjadi tempat sharing dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-teman seperjuanganku di kelas M1 angkatan 2013 dan teman-teman Kelompok Kuliah Kerja Nyata yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,

terima kasih atas doa, semangat dan bantuan kalian semua. Semoga kesuksesan menghampiri kita semua. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran untuk kemajuan yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga pembaca.

Tanjungpinang, Januari 2020

Penulis

DEWI OKTAVIANI

NIM. 13622313

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Teory Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	13
2.1.2 Audit <i>Tenure</i>	21
2.1.3 Rotasi Audit.....	25
2.1.4 Komite Audit.....	29
2.1.5 Kepemilikan Manajerial	32
2.1.6 Kepemilikan Institusional	35
2.1.7 Kualitas Audit	37
2.1.8 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat	41

2.1.8.1 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit.....	41
2.1.8.2 Pengaruh Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit.....	42
2.1.8.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Audit....	42
2.1.8.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kualitas Audit.....	42
2.1.8.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Audit	43
2.2 Kerangka Pemikiran	43
2.3 Hipotesis	45
2.4 Penelitian Terdahulu.....	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Jenis dan Sumber Data	50
3.3 Metode Pengumpulan Data	51
3.4 Populasi	51
3.5 Sampel Penelitian	53
3.6 Definisi Operasional Variabel	55
3.6.1 Variabel Dependen (Y)	55
3.6.2 Variabel Independen (X).....	56
3.6.2.1 Audit Tenure (X1).....	57
3.6.2.2 Rotasi Audit (X2).....	57
3.6.2.3 Komite Audit (X3).....	57
3.6.2.4 Kepemilikan Manajerial (X4).....	58
3.6.2.5 Kepemilikan Institutional (X5).....	58
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	59
3.8 Teknik Analisis Data	60
3.8.1 Statistik Deskriptif.....	61
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	61
3.8.2.1 Uji Normalitas.....	62
3.8.2.2 Uji Multikoleniaritas.....	63
3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	64
3.8.2.4 Uji Autokorelasi.....	64
3.8.3 Analisis Regresi Berganda	65

3.8.4 Uji Hipotesa.....	66
3.8.4.1 Uji Parsial (Uji T)	66
3.8.4.2 Uji Simultan (Uji F).....	67
3.8.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	68
3.9 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	70
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bursa Efek Indonesia.....	70
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bursa Efek Indonesia	71
4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bursa Efek Indonesia.....	72
4.2 Data Penelitian	74
4.3 Analisis Data	76
4.3.1 Penyajian Data.....	76
4.3.1.1 Audit <i>Tenure</i>	76
4.3.1.2 Rotasi Audit	77
4.3.1.3 Komite Audit	77
4.3.1.4 Kepemilikan Manajerial.....	78
4.3.1.5 Kepemilikan Institusional	84
4.3.1.6 Kualitas Audit	90
4.3.2 Statistik Deskriptif.....	92
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	94
4.3.3.1 Uji Normalitas.....	94
4.3.3.2 Uji Multikolinearitas	97
4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	99
4.3.3.4 Uji Autokorelasi.....	101
4.3.4 Analisis Regresi Berganda	103
4.3.5 Pengujian Hipotesis.....	106
4.3.5.1 Uji Partial (Uji T).....	106
4.3.5.2 Uji Simultan (Uji F).....	107
4.3.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	109
4.4 Pembahasan	110

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Populasi Penelitian.....	52
Tabel 3.2	Sampel Penelitian.....	54
Tabel 3.3	Daftar Perusahaan	55
Tabel 3.4	Uji Autokorelasi.....	65
Tabel 4.1	Sampel Penelitian.....	75
Tabel 4.2	Daftar Perusahaan	75
Tabel 4.3	Audit Tenure Tahun 2011 - 2018.....	76
Tabel 4.4	Rotasi Audit Tahun 2011 - 2018.....	77
Tabel 4.5	Komite Audit Tahun 2011 - 2018.....	78
Tabel 4.6	Kepemilikan Saham Manajemen Tahun 2011 - 2018.....	78
Tabel 4.7	Seluruh Modal Saham Beredar di Perusahaan Tahun 2011 - 2018	80
Tabel 4.8	Hasil Kepemilikan Manajerial Tahun 2011 - 2018.....	81
Tabel 4.9	Kepemilikan Saham Investor Tahun 2011 - 2018	84
Tabel 4.10	Seluruh Modal Saham Beredar di Perusahaan Tahun 2011 - 2018	85
Tabel 4.11	Hasil Kepemilikan Institusional Tahun 2011 - 2018	87
Tabel 4.12	Kualitas Audit Tahun 2011 - 2018.....	90
Tabel 4.13	Daftar Nama KAP Yang Digunakan.....	91
Tabel 4.14	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	93
Tabel 4.15	Hasil Uji Normalitas Dengan One Sampel K-S Test.....	97
Tabel 4.16	Hasil Uji Multikolinearitas	98
Tabel 4.17	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Spearman's rho	101
Tabel 4.18	Hasil Uji Durbin Watson	102
Tabel 4.19	Hasil Uji Regresi Berganda	103
Tabel 4.20	Hasil Uji Partial (Uji T)	106
Tabel 4.21	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	108
Tabel 4.22	Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2).....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 4.1 Grafik Kepemilikan Manajerial	83
Gambar 4.2 Grafik Kepemilikan Institusional.....	89
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Dengan Histogram	95
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik P-Plot.....	96
Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Scatterplot.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Nama Perusahaan
- Lampiran 2 : Data Input Tabulasi
- Lampiran 3 : Hasil Output SPSS
- Lampiran 4 : Uji Plagiat

ABSTRAK

PENGARUH AUDIT *TENURE*, ROTASI AUDIT, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2011-2018

Dewi Oktaviani, 13622313, S-1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Email : dewioktaviani720@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Audit *Tenure*, Rotasi Audit, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dan sumber data penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit yang dikumpulkan berdasarkan satuan waktu. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan SPSS Versi 21.0 *for windows* dengan menggunakan alat statistik regresi linier berganda dengan satu variabel terikat (Y) dan lima variabel bebas (X1,X2,X3,X4,X5).

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengujian secara simultan pengaruh audit *tenure* (X1), rotasi audit (X2), komite audit (X3), kepemilikan manajerial (X4) dan kepemilikan institusional (X5) terhadap kualitas audit (Y) dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *Audit Tenure*, Rotasi Audit, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit dengan melihat nilai signifikansi sebesar 0.000 dengan batas signifikansi 0.05. Maka signifikansi $0.000 < 0.05$.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan kajian teori menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikan 5% menunjukkan bahwa Audit *Tenure*, Rotasi Audit dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018. Komite Audit, Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018.

Kata Kunci: Audit *Tenure*, Rotasi Audit, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit.

Dosen Pembimbing I : Hendy Satria, SE, M.Ak

Dosen Pembimbing II : Charly Marlinda, SE, M.Ak.Ak.CA

ABSTRACT

INFLUENCE OF AUDIT TENURE, AUDIT ROTATION, AUDIT COMMITTEE, MANAGERIAL OWNERSHIP AND INSTITUTIONAL OWNERSHIP OF AUDIT QUALITY IN MANUFACTURING COMPANY SECTOR INDUSTRIES REGISTERED CONSUMPTION GOODS IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 2011-2018

Dewi Oktaviani, 13622313, S-1 Accounting
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Email : dewioktaviani720@gmail.com

The purpose of this study was to determine the effect of Audit Tenure, Audit Rotation, Audit Committee, Managerial Ownership and Institutional Ownership on Audit Quality in Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector that are listed on the Indonesia Stock Exchange 2011-2018.

The type of research used is quantitative descriptive and the type of data used is secondary data type and the source of this research data is in the form of audited company's annual financial statements which are collected based on time units. The data analysis technique used is using SPSS Version 21.0 for windows using multiple linear regression statistical tools with one dependent variable (Y) and five independent variables (X1, X2, X3, X4, X5).

The results of this study indicate that the results of simultaneous testing the influence of audit tenure (X1), audit rotation (X2), audit committee (X3), managerial ownership (X4) and institutional ownership (X5) on audit quality (Y) using the program SPSS obtained test results show that the variables of Audit Tenure, Audit Rotation, Audit Committee, Managerial Ownership and Institutional Ownership have a significant effect on Audit Quality by seeing a significance value of 0,000 with a significance limit of 0.05. Then the significance is $0.000 < 0.05$.

The results of research conducted with a theoretical study using multiple linear regression analysis with a significant level of 5% indicate that Audit Tenure, Audit Rotation and Institutional ownership has no significant effect on audit quality in manufacturing companies in the Consumer Goods Industry Sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange 2011-2018. Audit Committee, Managerial Ownership has a significant effect on Audit Quality in manufacturing companies in the Consumer Goods Industry Sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange 2011-2018.

Keywords: Audit Tenure, Audit Rotation, Audit Committee, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Audit Quality.

Supervisor I : Hendy Satria, SE, M.Ak

Supervisor II : Charly Marlinda, SE, M.Ak.Ak.CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat vital bagi para pengambil keputusan khususnya bagi para pemimpin perusahaan atau biasa disebut pihak internal. Melalui laporan keuangan pihak internal dapat mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Begitu pula bagi pihak eksternal perusahaan dalam memberikan penilaiannya mengenai suatu perusahaan, oleh karena itu laporan keuangan suatu perusahaan harus berkualitas. Berkualitas atau tidaknya suatu laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik laporan keuangan tersebut. Menurut FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Akan tetapi kedua karakteristik tersebut sangat sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor. Mereka dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan bagi pihak yang menggunakan laporan tersebut bagi pihak internal maupun eksternal. Dengan demikian, pihak internal dan pihak eksternal akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang mereka perlukan guna kepentingan mereka masing-masing.

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang di audit oleh auditor yang independen agar hasilnya dapat diandalkan oleh pemakai laporan

keuangan. Independensi auditor sangat di butuhkan karena jika auditor tidak independen maka perusahaan akan mengganti atau memilih auditor lain yang memiliki independensi yang bagus. Dengan banyaknya kebutuhan terhadap jasa audit maka semakin banyak juga KAP yang beroperasi. Sehingga perusahaan bisa memilih KAP mana yang akan mengaudit laporan keuangan mereka, disisi lain Kantor Akuntan publik pun akan berusaha untuk memberikan jasa audit yang baik sehingga klien (perusahaan) bersedia untuk di audit. Auditor harus menjamin bahwa kualitas audit yang mereka lakukan benar-benar berkualitas supaya menghasilkan laporan audit yang berkualitas pula. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Dengan demikian, auditor harus memastikan tidak ada kekeliruan material ketika melakukan proses audit sebelum memberikan opininya. Namun pada akhir-akhir ini kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik kembali mendapat sorotan oleh masyarakat menyusul banyak kasus yang melibatkan auditor. Beberapa kasus yang melibatkan mereka marak terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Seperti kasus yang terjadi pada akuntan publik Drs. Thomas Iguna, Menteri Keuangan membekukan izin akuntan publik Drs. Thomas Iguna, auditor yang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT. Bank Global International Tbk. Pencabutan izin tersebut tertuang didalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KM.1/2008 tanggal 26 Februari 2008

selama 12 (dua belas) bulan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said mengungkapkan, auditor itu dibekukan izinnya karena dinilai melanggar Standar Auditing (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan auditnya di Bank Global itu. Pembekuan merupakan buntut dari kasus Bank Global dimana sebelumnya Bank Indonesia membekukan usaha Bank Global. Saat itu, Bank Global terbukti melakukan pidana perbankan dengan memanipulasi data rasio kecukupan modal (CAR). Sejak awal, ada dugaan kuat yang dipublikasikan disusun sedemikian rupa bagusnya. Selama masa pembekuan izin akuntan ini dilarang memberikan jasa audit apapun meliputi jasa attestasi termasuk audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan propektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, serta jasa attestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP (Tempo, 2008).

Kasus lain yang cukup menarik adalah Kasus Telkom tentang tidak diakuinya KAP Eddy Pianto oleh SEC dimana SEC tentu memiliki alasan khusus mengapa mereka tidak mengakui keberadaan KAP Eddy Pianto. Kemudian kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam. Fenomena lain yang terjadi berkaitan dengan isu-isu pelanggaran Kode Etik yang terjadi yaitu dengan dibekukannya KAP Drs Tahrir Hidayat dan Akuntan Publik (AP) Drs Dody Hapsoro. KAP Drs Tahrir Hidayat dibekukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 11 Juni 2008. Sementara AP Drs Dody Hapsoro melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor

409/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 20 Juni 2008. Pembekuan ini karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) dan anak perusahaan (Dita, 2012). Peristiwa-peristiwa dan indikasi tersebut menyebabkan timbulnya keraguan atas integritas seorang auditor. Terlebih lagi kasus diatas melibatkan kantor akuntan publik dan perusahaan berskala nasional di negeri ini. Kemudian bagaimana dengan kantor akuntan publik yang berada didaerah seperti KAP yang ada di Yogyakarta yang statusnya tergolong dalam ukuran KAP yang lebih kecil. Apakah kualitas auditnya masih bisa diandalkan atau sebaliknya. Sayangnya tidak semua kasus penyimpangan yang melibatkan auditor kantor akuntan publik tidak terpublikasikan dinegeri ini sehingga sulit juga bagi masyarakat untuk mengetahuinya.

Kasus tersebut diatas juga memperlihatkan bahwa adanya indikasi auditor melakuakn kerjasama dengan pihak yang diaudit untuk memanipulasi laporan keuangan. Dalam kasus tersebut auditor seakan-akan kurang memiliki sikap tanggungjawab dan independen dalam melakukan tugas audit. Padahal auditor merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas auditing kemudian muncul pertanyaan apakah para auditor masih memiliki sikap indepedensi yang tinggi atau sikap kebertanggungjawaban (akuntabilitas) akuntan publik yang sudah mulai pudar. Dengan begitu bagaimana dengan hasil audit yang mereka lakukan apakah masih dapat diandalkan atau tidak, padahal kualitas audit berperan sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi akan dihasilkan

laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Fenomena yang terjadi pada beberapa perusahaan, oleh auditor yang telah melakukan audit secara terus menerus dimana lebih dari enam tahun. Sedangkan Peraturan yang diperbaharui yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 ayat (1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Kasus yang dialami oleh perusahaan Enron merupakan salah satu skandal akuntansi terbesar di dunia yang telah runtuh dan diduga akibat perikatan audit yang panjang dengan Kantor Akuntan Publik Internasional Arthur Anderson. Kasus Enron ini melibatkan *Chief Executive Officer* (CEO), Dewan Komisaris, Komite Audit, Audit Internal sampai Auditor Eksternal dan menempatkan auditor sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan audit. Kegagalan audit tersebut diduga diakibatkan karena KAP Arthur Anderson menjalin perikatan audit dengan perusahaan Enron selama lebih dari 20 tahun (Siregar, 2014).

Masa perikatan audit yang panjang antara Enron dengan KAP Arthur Anderson memunculkan persepsi bahwa masa perikatan audit atau audit *tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang

panjang dapat menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independen auditor. Oleh karena itu, diberlakukan adanya rotasi yang bersifat *mandatory* supaya mengurangi hubungan spesial yang terjalin antara klien dengan auditor (Yuvisa, dkk. dalam (Margi & Rochman, 2014). Rotasi audit tidak hanya bermanfaat sebagai solusi dalam mengatasi masalah independensi auditor akibat hubungan *tenure* yang panjang tetapi juga bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman auditor.

Auditor menjadi pihak yang sangat dibutuhkan oleh pemegang saham untuk mengaudit laporan keuangan dengan tujuan memberikan jaminan kepada mereka bahwa laporan keuangan perusahaan relevan dan dapat diandalkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola saham yang mereka investasikan di perusahaan tersebut (Liftiani dalam (Artati, 2016). Hal tersebut yang kemudian akan berpengaruh terhadap permintaan auditor. Kualitas audit dari suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor kepemilikan Manajerial dan Institusional.

Kualitas audit juga dapat dilihat dari komite audit. Menurut (Elder, Beasley, Arens, & Jusuf, 2011), Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggungjawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Untuk membantu melakukan pengawasan, dewan membentuk komite audit yang disertai tanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan. Komite audit juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan auditor eksternal maupun internal, termasuk menyetujui jasa audit dan non audit yang dilakukan oleh para auditor perusahaan

publik. Hal ini memungkinkan para auditor dan direktur membahas berbagai masalah yang mungkin berhubungan dengan hal-hal seperti integritas atau tindakan manajemen. Sehingga hubungan kekerabatan antara auditor dengan manajemen yang dapat merusak kualitas audit dapat dibatasi dengan peranan komite audit di sebuah perusahaan.

De Angelo mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Deis dan Groux sebagaimana dikutip oleh (Alim, 2017) menjelaskan kualitas audit ditentukan akuntabilitas dan independensi, akuntabilitas adalah kualitas dari pekerjaan auditor yang dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit (Mardisar, 2017) dan independensi auditor dimana probabilitas auditor untuk melaporkan pelanggaran yang auditor temukan tergantung pada independensi auditor.

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian (Artati, 2016) dengan menambahkan dua variabel independen yang diadopsi dari penelitian kurniasih dan (Rohman, 2014) yaitu *Audit Tenure* dan *Rotasi Audit*. Penelitian ini berjudul **”PENGARUH AUDIT *TENURE*, ROTASI AUDIT, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2011-2018.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Apakah Audit *Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018?
2. Apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018?
5. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018?

1.3 Batasan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Audit *Tenure*, Rotasi Audit, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri

Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018. Akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa keterbatasan masalah dalam melakukan penelitian. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018.
2. Dalam penelitian ini perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.
3. Variabel yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya Audit *Tenure*, Rotasi Audit, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Audit.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat untuk investor

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan komite audit perusahaan terhadap kualitas audit sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

2. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mencegah pihak manajemen dari penyalahan penggunaan laporan keuangan dan dapat memberi masukan bagi pihak manajemen dalam memilih auditor yang tepat sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya keakuratannya.

3. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian yang lebih sempurna di masa yang akan datang dan

diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi serta menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya Kualitas Audit.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dari skripsi ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya sampel penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, metode penelitian serta metodologi analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teory Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka para tenaga-tenaga profesional bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai *agents*-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agents*. Sementara pemilik jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekeja demi kepentingan perusahaan (Adrian, 2011).

Teori Agensi (*Agency Theory*) adalah teori yang menjelaskan konflik yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik

perusahaan selaku *principal*. Pemilik perusahaan ingin mengetahui semua informasi mengenai aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan dana yang mereka investasikan dalam perusahaan tersebut. Melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh agen, *principal* dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja agen selama periode tertentu. Namun, yang terjadi adalah kecenderungan manajemen melakukan berbagai tindakan agar laporan pertanggungjawaban terlihat baik dan menghasilkan keuntungan bagi *principal*, sehingga kinerja agen dianggap baik. Untuk meminimalisasi hal tersebut, diperlukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yaitu auditor. Dengan demikian, laporan keuangan yang dibuat oleh agen dapat *reliable* (dapat dipercaya). Teori keagenan ini membantu auditor memahami konflik kepentingan yang muncul antara agen dan *principal*. *Principal* selaku investor bekerja sama dan menandatangani kontrak kerja dengan agen atau manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka. Dengan adanya auditor yang independen diharapkan tidak lagi terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sehingga akan menghasilkan informasi yang relevan yang berguna bagi investor dan kreditor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

Menurut (Tandiontong, 2016), *Agency Theory* merupakan implementasi dalam organisasi modern. *Agency Theory* menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari

kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agen-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar pula manfaat yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan system insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Teori keagenan (*Agency Theory*) menyatakan perlunya jasa independen auditor dapat dijelaskan dengan dasar teori keagenan (*Agency Theory*), yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Dengan adanya perkembangan perusahaan atau entitas bisnis yang semakin besar, maka sering terjadi konflik antara *principal* dalam hal ini adalah para pemegang saham (*investor*) dan pihak *agent* yang diwakili oleh manajemen (direksi). Asumsi bahwa manajemen yang terlibat dalam perusahaan akan selalu memaksimalkan nilai perusahaan ternyata tidak selalu terpenuhi. Manajemen memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga muncul masalah yang disebut dengan masalah agensi (*agency problem*) akibat adanya *asymmetric information*. Untuk mengurangi adanya masalah agensi ini diperlukan adanya pihak independen yang dapat menjadi pihak penengah

dalam menangani konflik tersebut yang dikenal sebagai independen auditor (*Auditor's Independent*) (Tandiontong, 2016).

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam (S. P. Siagian, 2009) adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* memperkerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham, bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Office*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham memperkerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling dalam (S. Siagian, 2014) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan, sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Eisenhardt dalam (Siagian, 2008) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia, yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku *opportunistic* dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

Dari teori keagenan terdapat pemisahan yang jelas antara principal dan agen serta adanya pihak-pihak seperti pemegang saham, *debtholders* dan manajemen yang mempunyai kepentingan berbeda sering menimbulkan suatu masalah yang disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*). *Agency conflict* terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Masalah ini timbul karena adanya kecenderungan manajemen untuk melakukan moral hazard dalam memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan pihak *principal*. *Moral hazard* yaitu permasalahan yang akan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Moral hazard muncul karena seseorang

atau perusahaan tidak mengambil konsekuensi penuh dan tanggung jawab tindakan, dan karena itu manajemen memiliki kecenderungan untuk bertindak kurang hati-hati dari pada seharusnya, meninggalkan pihak lain untuk memegang beberapa tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Agency conflict dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dengan menghindari penilaian negatif investor yang disebabkan karena buruknya kinerja perusahaan (Gumantri, 2017). Menurut (Sartono, 2010) usaha yang dapat dilakukan guna meminimumkan konflik keagenan tersebut antara lain :

1. Pemberian kompensasi yang cukup baik berupa kompetensi minimum, kompensasi, tambahan dan pemberian *stock option* yaitu hak untuk membeli saham perusahaan dimasa datang dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan dimuka. Pemberian *stock option* ini diyakini dapat menurunkan konflik keagenan, karena semakin baik kinerja perusahaan maka harga saham akan semakin tinggi. Hal ini tidak saja akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham tetapi juga meningkatkan nilai opsi bagi manajemen.
2. Intervensi langsung oleh pemegang saham.
3. Ancaman untuk dipecat atau *thraet of rifting*. Banyak contoh direksi perusahaan harus berhenti karena kinerja yang jelek. Selain itu *market mechanism* diyakini dapat mendisiplinkan manajemen karena manajer yang tidak profesional, kinerjanya jelek tentu tidak akan mendapatkan tempat dan penghargaan yang cukup.

4. Ancaman untuk diambil alih atau *thraet of takeovers*. Perusahaan yang kinerjanya jelek maka harga yang sahamnya akan jatuh dan konsekuensinya menjadi sasaran untuk diambil oleh perusahaan lain. Manajer menyadari hal itu yang akan berakibat hilangnya posisi sebagai direksi perusahaan. Ungkapan yang menarik disimak adalah jika direksi tetap menginginkan jabatannya, jangan biarkan harga saham perusahaan mengalami penurunan.

Guna memperkecil konflik keagenan tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya yang disebut dengan biaya keagenan atau *agency cost*. Biaya keagenan tersebut mencakup biaya untuk membuat sistem informasi yang baik, biaya akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan agar tidak terjadi penyelewengan, pemberian insentif termasuk manajemen dan karyawan, pengangkatan anggota komisaris dari luar perusahaan agar netral, biaya pengawasan manajemen dan lain-lain.

Menurut (Brigham & Houston, 2008) para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara *principal* dan *agent*, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara *principal* dan *agent*. Menurut (Arifin, 2012) teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan kuasa atau wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen

merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Dengan demikian kontrak kerja yang baik antara prinsipal dan agen adalah kontrak kerja yang menjelaskan apa saja yang harus dilakukan manajer dalam menjalankan pengelolaan dana yang diinvestasikan dan mekanisme bagi hasil berupa keuntungan, *return* dan resiko-resiko yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya. Prinsipal akan menugaskan *agent* untuk meningkatkan kemakmurannya. Namun sebaliknya, manajer sebagai agent juga mempunyai dorongan untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri antara lain dengan melakukan manajemen laba (*earning management*). Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* ini mengakibatkan adanya konflik keagenan.

Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Dalam konsep teori agensi, manajemen sebagai agen seharusnya bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Namun, tidak menutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitasnya. Manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara menyeluruh yang dalam jangka panjang dapat merugikan

kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh *agent* tersebut mengakibatkan diperlukannya suatu mekanisme yang dapat meminimalisir tindakan tersebut. *Coorporate governance* merupakan mekanisme yang dipercaya dapat mengendalikan dan mengawasi tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan yang dilakukan oleh *agent*.

2.1.2 Audit Tenure

Menurut (Junaidi & Nurdiono, 2016), Tenure Auditor (KAP) menunjukkan lama hubungan antara auditor dengan klien. Tenure auditor panjang dapat meningkatkan kompetensi auditor. Auditor dapat mendasarkan keputusan auditnya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu. Tenure adalah lamanya masa perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. *Tenure* menjadi perdebatan pada saat *audit tenure* yang dilakukan secara singkat dan *audit tenure* yang dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama (Maharani, 2015).

Ketentuan mengenai audit *tenure* telah diatur dalam Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 423/KMK.06/2002 tanggal 30 September 2002 tentang Jasa Akuntan Publik kemudian dirubah dalam Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 359/KMK.06/2002 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor

423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik dimana terdapat pada pasal II ayat (1) KAP yang telah memberikan jasa audit umum untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut atau lebih atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, dapat melaksanakan audit umum atas laporan keuangan entitas tersebut sampai dengan tahun buku 2003. (2) Akuntan Publik yang telah memberikan jasa audit umum untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut atau lebih atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, dapat melaksanakan audit umum atas laporan keuangan entitas tersebut sampai dengan tahun buku 2003. Peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 ayat (1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Masa perikatan audit (*Audit Tenure*) adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama. Masa perikatan dapat berdampak pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor-klien, independensi, *fee*, kompetensi, dan lain sebagainya. Sejak terkuaknya skandal-skandal profesi yang dilakukan akuntan publik, masa perikatan telah menjadi sorotan tajam. Hal ini dikarenakan masa perikatan yang lama akan menjadi ancaman bagi independensi auditor (Nuratama, 2011). Menurut (Hartadi, 2012) *auditor tenure* adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah

melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 *auditor tenure* identik dengan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa anggaran waktu. Permasalahan waktu penyelesaian audit terkait dengan perilaku disfungsional auditor memiliki implikasi yang serius terhadap kualitas audit. Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas audit, karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien (Utami & Sirajuddin, 2013).

Tenure adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Tenure biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor. Hubungan yang panjang antara KAP dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara mereka, hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. (Maulana, Hamid, & Mayoan, 2015) berpendapat bahwa dengan tenure yang singkat dimana saat auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Tenure yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika ditemukan. Sebaliknya terkait dengan tenure dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan hubungan emosional antara auditor dan klien. Adanya harapan pemulihan kepercayaan masyarakat, maka dengan tenure

singkat akan lebih meningkatkan kompetensi dai akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang dapat diandalkan. Menurut (Giri, 2010) bahwa ada dua masalah praktis yang dapat mengganggu kemampuan aktual dari seorang auditor untuk mempertahankan sikap independensi selama melaksanakan tugas audit, yaitu : 1) auditor harus memperhatikan rekomendasi dari manajemen perusahaan untuk melanjutkan tugas audit dari tahun ke tahun dan 2) secara personal, keberlanjutan tugas audit menyebabkan anggota KAP menjadi semakin dekat dengan manajemen. Hubungan yang semakin dekat ini mengakibatkan auditor lebih mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan manajemen daripada kepentingan publik.

Audit tenure adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun (Juanidi & Jogiyanto, 2010). Audit tenure dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Audit tenure dikaitkan dengan keahlian auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien, dan resiko. Selain itu audit tenure terkait dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin tinggi kualitas auditor maka perikatan akan diperpanjang. Kedua, audit tenure dapat menciptakan insentif ekonomi bagi auditor sehingga menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor. Hilangnya independensi dapat dilihat dari semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini audit *going concern*. Masa perikatan audit (audit tenure) adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama. Masa perikatan dapat berdampak pada

perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor-klien, independensi, fee, kompetensi, dan lain sebagainya. Sejak terkuaknya skandal-skandal profesi yang dilakukan akuntan publik, masa perikatan telah menjadi sorotan tajam. Hal ini dikarenakan masa perikatan yang lama akan menjadi ancaman bagi independensi auditor (Nuratama, 2011). Menurut (Hartadi, 2012) auditor tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa anggaran waktu. Permasalahan waktu penyelesaian audit terkait dengan perilaku disfungsional auditor memiliki implikasi yang serius terhadap kualitas audit. Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien (Utami & Sirajuddin, 2013).

2.1.3 Rotasi Audit

Rotasi Auditor, adalah pergantian kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit terhadap kliennya. Rotasi auditor terjadi karena dua hal yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Rotasi auditor mandatory terjadi karena auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien (Maharani, 2015). Kualitas audit seringkali menjadi dasar untuk mengeluarkan regulasi mengenai

rotasi auditor dengan tujuan untuk tetap menjaga kualitas audit. Ketika auditor harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya maka diperlukan lebih banyak waktu baginya untuk melakukan audit daripada ketika auditor melanjutkan penugasan pada klien terdahulunya (Chen *et al.* dalam (Ishak & Luthfi, 2011). Myers *et al.* dalam (Ishak & Luthfi, 2011) menyatakan kewajiban rotasi auditor itu penting jika kualitas audit memburuk. Rotasi audit adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor. Proses rotasi audit berdasarkan tujuannya dibagi menjadi :

1. Opinion Shopping

Perusahaan biasanya menggunakan pergantian auditor (*auditor switching*) untuk menghindari penerimaan opini *going concern* dalam dua cara. Pertama, mengancam auditornya untuk tidak mengeluarkan opini *going concern*, sehingga auditor tersebut menjadi tidak independen karena takut diganti (ancaman pergantian auditor). Kedua, apabila auditor tetap independen sehingga tetap mengeluarkan opini *going concern*, maka perusahaan akan menggantinya dengan auditor baru yang tidak memberi opini *going concern*. *Opinion shopping* didefinisikan oleh SEC, sebagai aktivitas mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi sesuai yang diajukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan, walaupun menyebabkan laporan tersebut menjadi tidak reliabel. Tujuan pelaporan dalam *opinion shopping* dimaksudkan untuk meningkatkan (memanipulasi) hasil operasi atau kondisi keuangan perusahaan. Laporan audit yang negatif akan mempengaruhi kemampuan perusahaan bertahan

di pasar modal, dan nilai *return* dari saham yang dimilikinya. Motivasi untuk *opinion shopping* bisa juga ditimbulkan oleh kemunduran kondisi ekonomi. *Opinion shopping* menyebabkan dampak negatif, diantaranya dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan kualitas keputusan investasi dan kredit. Laporan keuangan yang dimanipulasi sering menyebabkan kehancuran bisnis, akibatnya berdampak pada reputasi auditor.

2. Audit Switching

Auditor switching merupakan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. Faktor yang menyebabkan praktik ini terjadi dapat berasal dari klien maupun auditor itu sendiri. *Auditor switching* dapat dilakukan dengan adanya peraturan (atau bersifat mandatory) atau dengan suka rela di luar peraturan yang ada (*voluntary*). Disaat perusahaan melakukan perpindahan auditor secara *voluntary*, terdapat dua kemungkinan atas keputusan tersebut, yaitu: perusahaan memberhentikan auditor atau auditor yang mengundurkan diri. Rotasi wajib auditor akan meningkatkan kualitas audit ketika durasi hubungan antara auditor dan klien terputus. Ini menunjukkan bahwa pengamatan rotasi auditor bisa meningkatkan independensi auditor dan memberikan para auditor insentif yang lebih besar untuk menolak tekanan-tekanan manajemen (Tandiontong, 2016).

Menurut (Elder et al., 2011), Rotasi partner dan KAP seperti diminta oleh PMK 17/2006, aturan independensi Bapepam-LK mensyaratkan partner audit untuk merotasi tim audit setelah 3 tahun dan KAP setelah 6 tahun, Bapepam-LK mensyaratkan 3 tahun “rehat” setelah rotasi sebelum mereka bisa kembali bekerja untuk klien audit yang sama.

Rotasi audit merupakan pergantian kantor akuntan publik dimana akuntan publik di Indonesia hanya dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal tiga tahun berturut-turut (Siregar, 2014). Dengan adanya kasus Enron yang melibatkan KAP internasional tindakan pergantian auditor secara wajib. Penerapan ketentuan tentang adanya rotasi mandatory ini dengan tujuan supaya dapat meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. Rotasi mandatory ini diharapkan dapat berpengaruh signifikan pada praktik pengauditan yang dilakukan oleh seorang auditor dengan menjaga sikap independensi (Giri, 2010). Untuk menjaga sikap independen sebagai auditor maka perusahaan wajib untuk melakukan rotasi audit. Rotasi audit adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh sebuah entitas. Hal itu menyebabkan Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang "Jasa Akuntan Publik" dimana telah direvisi dalam KMK Nomor 359/KMK.06.2003. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 3 ayat 1 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Atas keputusan tersebut maka perusahaan harus melakukan pergantian auditor dan Kantor Akuntan Publik setelah terdapatnya jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut.

Diharapkan juga dapat mempertahankan suatu independensi auditor agar kualitas yang dicapai menjadi maksimal.

2.1.4 Komite Audit

Menurut (Rahayu & Suhayati, 2013), Komite audit merupakan sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit akan memutuskan kantor akuntan publik mana yang diberi tugas, dan menentukan ruang lingkup pekerjaan, melakukan pertemuan untuk membahas hasil audit, dan membantu menengahi bila terjadi peselisihan antara manajemen dan auditor. Komite audit harus sepenuhnya terdiri atas komisaris independen. Anggota komite tidak boleh menerima imbalan dari perusahaan, tidak boleh mengendalikan atau memiliki hak suara sebesar 5 persen atau lebih, dan lebih boleh menjabat sebagai eksekutif, komisaris, rekanan, atau karyawan perusahaan (Pearce & Robinson, 2008). Menurut (Elder et al., 2011), Komite audit adalah komite dibawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangnya seorang komisaris independen dan para professional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen.

Menurut (Elder et al., 2011), Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggungjawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari tiga hingga lima tahun atau terkadang paling banyak tujuh direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Menurut (Elder et al., 2011),

dewan komisaris berperan penting dalam tata kelola korporasi yang efektif karena memikul tanggungjawab akhir untuk memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang layak. Dewan komisaris yang efektif independen dengan manajemen, dan para anggotanya terus meneliti dan terlibat dalam aktivitas manajemen. Meskipun mendelegasikan tanggung jawabnya atas pengendalian internal kepada manajemen, dewan harus secara teratur meniai pengendalian tersebut. selain itu, dewan yang aktif dan objektif sering kali jugadapat mengurangi kemungkinan bahwa manajemen mengesampingkan pengendalian yang ada.

Untuk membantu melakukan pengawasan, dewan membentuk komite audit yang disertai tanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan. Komite audit juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan auditor eksternal maupun internal, termasuk menyetujui jasa audit dan non audit yang dilakukan oleh para auditor perusahaan publik. Hal ini memungkinkan para auditor dan direktur membahas berbagai masalah yang mungkin berhubungan dengan hal-hal seperti integritas atau tindakan manajemen. Independensi komite audit dari manajemen serta pengetahuan tentang masalah pelaporan keuangan merupakan determinan yang penting menyangkut kemampuannya untuk mengevaluasi secara efektif pengendalian internal dan laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen. Banyak juga perusahaan tertutup yang membentuk komite audit yang efektif. Untuk perusahaan tertutup lainnya, tata kelola mungkin dilakukan oleh *partner, trustee*, atau komite manajemen, seperti komite keuangan atau anggaran. Dalam beberpa entitas yang kecil, tata kelola mungkin hanya

dilakukan oleh pemilik entitas. Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengawasi arah strategis entitas dan akuntabilitas entitas, termasuk pelaporan keuangan dan pengungkapan, disebut sebagai pihak-pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola oleh standar auditing.

Menurut (Hall & Singleton, 2009), Dewan komisaris perusahaan yang besar dan diperdagangkan secara publik membentuk sebuah subkomite yang disebut komite audit yang bertanggungjawab khusus mengenai audit. Komite ini biasanya terdiri atas tiga orang, dan haruslah orang luar (tidak berkaitan dengan keluarga pihak manajemen eksekutif serta pejabat yang dulu diperusahaan an sebagainya). Dengan kebangkitan Undang-unang Sarbanes-Oxley (*Sarbanes-Oxley Act*), paling tidak salah satu dari anggota komite tersebut haruslah seorang “pakar keuangan”. Penipuan dimasa lalu memiliki beberapa kesamaan yang berkaitan engan komite audit kurangnya independensi para anggota komite audit, ketidakberadaan komite audit atau tidak aktif, serta kurangnya pengalaman anggota dewan (berdasarkan studi kasus COSO mengenai pelanggaran SEC).

Menurut Tjager dkk dalam (Hartono & Nugrahanti, 2014) komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip good corporate governance terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai. Komite audit juga bertanggung jawab terhadap pengawasan proses pelaporan keuangan. Selain itu komite audit merupakan penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah

pengendalian. (Susiana & Herawaty, 2017) menjelaskan dibentuknya komite audite oleh dewan komisaris memiliki tujuan diantaranya :

1. Memastikan laporan keuangan yang diterbitkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi berterima umum.
2. Memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan memadai.
3. Menindaklanjuti terhadap adanya dugaan penyimpangan yang sifatnya material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Menurut Sitorus dalam (Hartono & Nugrahanti, 2014) menerangkan bahwa pembentukan komite audit dapat meningkatkan fungsi pengawasan dewan komisaris sebagai salah satu struktur tata kelola. Komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah anggota komite audite yang terdapat diperusahaan.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh eksekutif dan direktur. Persentase kepemilikan ditentukan oleh besarnya persentase jumlah saham terhadap keseluruhan saham perusahaan. Seseorang yang memiliki saham suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan walaupun jumlah sahamnya hanya beberapa lembar saja Tuarita dalam (Artati, 2016). Menurut Pratama dalam (Artati, 2016) kepemilikan manjerial diukur dengan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan terhadap total jumlah saham yang beredar. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan

pemegang saham. Berarti dalam hal ini manajer merangkap sebagai pemilik/pemegang saham sekaligus sebagai pihak manajer aktif/pengelola ikut dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan (Maharani dalam (Artati, 2016).

Meningkatkan kepemilikan manajerial dipergunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha bekerja secara optimal dan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Manajemen selalu berupaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan maka kekayaannya yang dimiliki sebagai pemegang saham akan meningkat, sehingga kesejahteraan pemegang saham akan meningkat pula (Pratiwi dalam (Artati, 2016). Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, Josua, & Chistiawan, 2017). Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan sering kali bertindak bukan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, melainkan justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri. Kondisi tersebut akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut konflik keagenan atau *agency conflict*.

Situasi tersebut diatas tentunya akan berbeda jika kondisi manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial

rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportuistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajer dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Dengan demikian, manajer akan bertindak secara hati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka akan turut menanggung hasil keputusan yang diambil. Pada kepemilikan yang menyebar, masalah keagenan terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Hal ini menyebabkan pemegang saham memiliki kekuasaan dan menyerahkannya kepada manajer. Sebagai konsekuensinya, manajer menuntut kompensasi yang tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya biaya keagenan. Pada kondisi ini, konflik keagenan diatasi dengan meningkatnya kepemilikan manajerial (Luciana, Almiliadan, Meliza, & Meliza, 2017).

Manajer mendapat kesempatan untuk terlibat pada kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyelaraskan dengan pemegang saham. Oleh karena pendanaan dengan sumber dana internal lebih efisien dibanding pembiayaan dengan sumber daya eksternal maka melalui kebijakan tersebut manajer diharapkan menghasilkan kinerja yang baik serta mengarahkan dividen pada tingkatan yang rendah. Penetapan dividen yang rendah akan membuat perusahaan memiliki laba ditahan yang tinggi, sehingga memiliki sumber dana internal relatif tinggi (Chen dan Steiner dalam (Kartika, 2017).

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Sabrinna dalam (Artati, 2016). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Artati, 2016). Menurut Wening dalam Sabrina yang dikutip oleh (Artati, 2016) kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Menurut Zureigat dalam Liftiani yang dikutip oleh (Artati, 2016) proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan jumlah besar membuat investor tersebut dapat secara langsung mempengaruhi keputusan manajerial. Zureigat dalam (Artati, 2016) juga berpendapat bahwa kepemilikan institusional akan meningkatkan permintaan atas jasa audit dengan kualitas tinggi yang dilakukan oleh auditor berkualitas. Namun semakin besar kepemilikan investor institusional dalam perusahaan, maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan investor institusional untuk

mengawasi manajemen. Akibatnya, manajemen akan termotivasi untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Artati, 2016). kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Widarjo, 2010). Menurut (Widiastuti, Midiastuty, & Suranta, 2013) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Kinerja yang meningkat tersebut akan menguntungkan bagi pemegang saham karena dengan kata lain pemegang saham akan mendapatkan banyak keuntungan berupa deviden (Patricia, 2014).

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Kusumawati, 2011). Kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost* dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dengan keterlibatan institusional dalam kepemilikan saham, manajemen perusahaan akan diawasi oleh investor-investor institusional sehingga kinerja manajemen juga akan meningkat (Dewi, 2018). Kepemilikan institusional dianggap sebagai efek substitusi dari upaya untuk meminimalkan biaya keagenan melalui kebijakan deviden dan utang. Oleh karena itu, untuk menghindari inefisiensi penggunaan sumber daya, diterapkan kebijakan deviden yang lebih rendah (Widiastuti et al., 2013).

2.1.7 Kualitas Audit

Menurut (Tandiontong, 2016), Kualitas audit (*Quality Audit*), dimaknai sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewangan yang terjadi dalam suatu system akuntansi klien. Kualitas audit ini tercermin dari orientasi masukan (*input orientation*), meliputi penugasan personel oleh KAP, untuk melaksanakan perjanjian, konsultasi, supervisi, pengangkatan, pengembangan profesi, promosi dan inspeksi; orientasi

proses (*processes orientation*), meliputi: independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, dan kompetensi auditor; orientasi keluaran (*output orientation*), meliputi: kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien; dan *due professional care*; tindak lanjut atas rekomendasi audit, meliputi: jajaran manajemen klien mendukung implementasi rekomendasi auditor; peraturan internal klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi audit; budaya perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi auditor; dan fasilitas fisik perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari auditor.

Kualitas audit (*Quality Audit*) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam suatu sistem akuntansi kliennya. Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertidnak jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self-interest* maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara principal dan agen akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi (Tandiontong, 2016).

Menurut (Artati, 2016), Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana auditor dapat melaporkan temuannya dengan baik atau tidak tentang adanya suatu pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi kliennya.

Tingginya kualitas audit merupakan suatu jaminan bahwa laporan keuangan telah secara tepat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kualitas audit yang tinggi meningkatkan kredibilitas laporan keuangan itu sendiri, sehingga sangatlah penting auditor untuk memperhatikan kualitas audit.

Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat diukur dari suatu perusahaan yaitu menggunakan jasa auditor *big four* dan *non big four*. Auditor *big four* adalah auditor yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi dibandingkan dengan auditor *non big four*, oleh karena itu auditor *big four* akan berusaha mempertahankan pangsa pasar, kepercayaan masyarakat dan reputasinya dengan cara memberikan perlindungan kepada publik. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Kualitas audit sangat penting dalam menjaga kepercayaan integritas pelaporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan tersebut khususnya investor. Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dan dirasakan, maka semakin kredibel laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Mgbame, *et al.* didalam (Ishak & Luthfi, 2011).

De Angelo mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kopetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor (Kusharyani dalam (Hardjanti, 2011). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan

berkualitas, jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah:

1. Meningkatkan pendidikan profesionalnya,
2. Mempertahankan independensi dan sikap mental,
3. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama,
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik,
5. Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik,
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten,
7. Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.

Selain itu, untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu.

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan

dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. *Audit quality* oleh Kane dan Velury dalam (Simanjuntak, 2011) didefinisikan sebagai tingkat kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien. Banyak faktor yang memainkan peran tingkat kemampuan tersebut seperti nilai akuntansi yang dapat menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan, termasuk fleksibilitas penggunaan dari *generally accepted accounting principles* (GAAP) sebagai suatu aturan standar, kemampuan bersaing secara kompetitif yang digambarkan pada laporan keuangan dan hubungannya dengan risiko bisnis, dan lain sebagainya. Audit sendiri dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-aseri tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil kepada para pengguna yang berkepentingan dalam (Simanjuntak, 2011).

2.1.8 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat

2.1.8.1 Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit

Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Jika terlampau panjang bisa menyebabkan turunnya tingkat obyektivitas yang merupakan syarat mutlaknya kualitas audit akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak (Permana dalam (Maharani, 2015)). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rohman, 2014) menunjukkan bahwa Audit *Tenure*

berpengaruh signifikan negative terhadap Kualitas Audit. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Maharani, 2015) yang menunjukkan bahwa Audit *Tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

2.1.8.2 Pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit

Rotasi Auditor adalah pergantian kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit terhadap kliennya. Rotasi auditor terjadi karena dua hal yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Rotasi auditor *mandatory* terjadi karena auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien (Maharani, 2015). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rohman, 2014) Rotasi Audit berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit.

2.1.8.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Komite audit adalah subkomite dari dewan komisaris yang bertanggung jawab atas proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (Messier, *et.al.*, dalam (Artati, 2016). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Artati, 2016) Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Soliman & Elsalam, 2012) bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

2.1.8.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Audit

Menurut Permasari dalam (Artati, 2016), Kepemilikan Manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam

pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Artati, 2016) Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Soliman & Elsalam, 2012) bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

2.1.8.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Audit

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya Juniarti dan Sentosa dalam Rebecca yang dikutip oleh (Artati, 2016).

Zureigat dalam (Artati, 2016) juga berpendapat bahwa kepemilikan institusional akan meningkatkan permintaan atas jasa audit dengan kualitas tinggi yang dilakukan oleh auditor berkualitas. Namun semakin besar kepemilikan investor institusional dalam perusahaan, maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan investor institusional untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, manajemen akan termotivasi untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

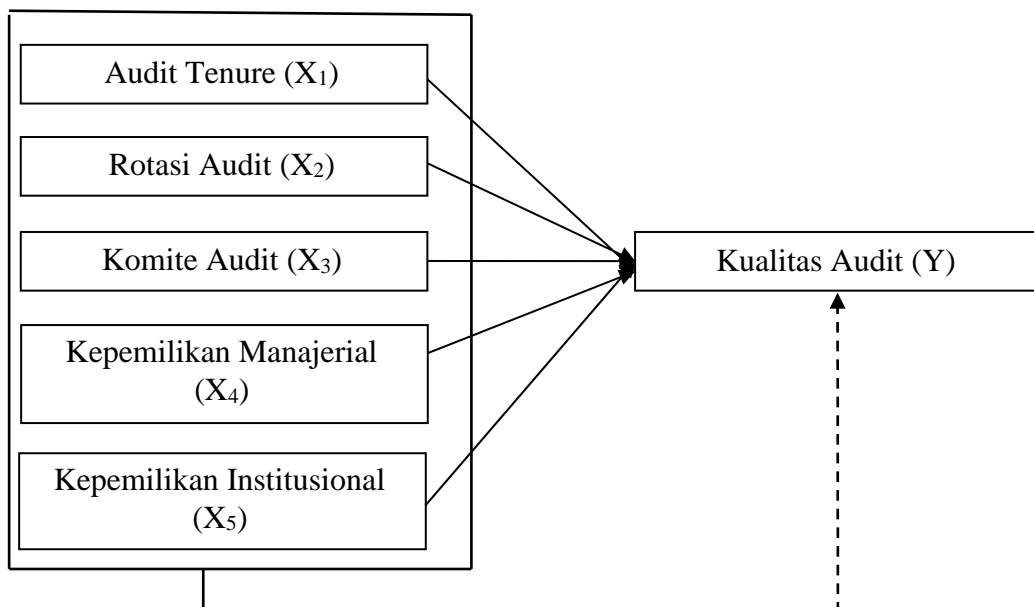
2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual yang menunjukkan hubungan di antara berbagai variabel yang dikembangkan oleh peneliti secara teoritis atau secara logis untuk menjawab masalah yang diteliti. Kerangka pikir

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah pengaruh audit tenure (X_1), rotasi audit (X_2), komite audit (X_3), kepemilikan manajerial (X_4) dan kepemilikan institusional (X_5) terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit (Y).

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

———— = Untuk mengetahui pengaruh audit tenure (X_1), rotasi audit (X_2), komite audit (X_3), kepemilikan manajerial (X_4) dan kepemilikan institusional (X_5) terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit (Y) secara parsial.

———— = Untuk mengetahui pengaruh audit tenure (X_1), rotasi audit

(X₂), komite audit (X₃), kepemilikan manajerial (X₄) dan kepemilikan institusional (X₅) terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit (Y) secara simultan.

2.3 Hipotesis

Menurut (Noor, 2013), Hipotesis berasal dari dua kata hypo (belum tentu benar) dan tesis (kesimpulan). Hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variable yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan uraian perumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

Audit Tenure, Rotasi Audit, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan baik parsial maupun simultan terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Kualitas Audit telah banyak dilakukan, beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Penelitian terdahulu (Artati, 2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Periode

2012-2014 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Kepemilikan manajerial dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Dari tabel dapat dijelaskan hasil uji regresi logistik dan didapat *Nagelkerke R Square* sebesar 0,620. Hal ini berarti bahwa variabilitas variabel dependen (kualitas audit) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) adalah sebesar 62% dalam memprediksi kualitas audit secara bersama-sama. Sedangkan sisanya ($100\% - 62\% = 38\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

2. Penelitian terdahulu (Kurniasih & Rohman, 2014) dengan judul penelitian “Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit”. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis satu (H1) dibuktikan bahwa variabel *fee audit* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dua (H2) dibuktikan bahwa variabel *audit tenure* berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tiga (H3) dibuktikan bahwa variabel rotasi audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Pada tabel ditunjukkan bahwa nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0.636. Hal ini berarti bahwa variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel-variabel independen sebesar 63.6%. Dalam pemahaman

lain, berarti bahwa variabilitas variabel *fee* audit, *tenure* auditor dan rotasi auditor sebesar 63.6% sedangkan sisanya sebesar 36,4% dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian.

3. Penelitian terdahulu (Maharani, 2015) dengan judul penelitian “Pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Fee* dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Indonesia Tahun 2011-2013)”. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa *audit tenure*, rotasi audit dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pada tabel ditunjukkan bahwa nilai Nagelkerke R square adalah sebesar 0.675 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 67,5%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model penelitian sebesar 32,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabilitas variable audit tenur, audit fee, rotasi auditor dan spesialisasi auditor dapat menjelaskan variabel kualitas audit sebesar 67,5 %.
4. (Nasution, 2013) dengan judul penelitian Ketergantungan Biaya Audit, masa kerja auditor, dan auditor independensi : kasus finlandia. Makalah Hijau tentang Kebijakan Audit yang diterbitkan oleh Eropa Komisi mempertanyakan, di antara isu-isu lain, apakah biaya maksimum dikumpulkan dari satu klien harus diatur dan apakah terus menerus tugas harus dibatasi. Dalam tulisan ini, kami memeriksa asosiasi antara ketergantungan biaya dan masa kerja auditor atas independensi auditor di

Finlandia. Kami menggunakan audit, non-audit, dan total biaya sebagai proksi dari ketergantungan biaya auditor dan discretionary accruals sebagai proksi independensi auditor. Kami menemukan bahwa : 1) ketergantungan biaya tidak terkait dengan akrual diskresioner; 2) auditor pendek masa jabatan (yaitu, satu tahun, sama atau kurang dari dua tahun, dan sama dengan atau kurang dari tiga tahun) berhubungan positif dengan akrual diskresioner, bagaimanapun, saja yang pertama secara statistik signifikan; 3) masa jabatan auditor yang panjang adalah negatif terkait dengan akrual diskresioner, meskipun hasil ini tidak secara statistik penting. Secara bersama-sama, hasil ini tidak mendukung kebijakan untuk mengatur biaya auditor dan membatasi masa kerja auditor di Finlandia.

5. (Ilechukwu & Ubaka, 2017) dengan judul Pengaruh Biaya Audit terhadap Kualitas Audit Perusahaan terdaftar di Nigeria. Ekspektasi investor dan pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan perusahaan yang dikutip adalah bahwa laporan keuangan dan laporan tahunan adalah benar dan adil tentang posisi perusahaan. Untuk mencapai hal ini, auditor eksternal harus memastikan kualitas audit. Penelitian ini telah menguji pengaruh biaya audit terhadap kualitas audit menggunakan sampel perusahaan terpilih dari sektor barang konsumen di Nigeria dalam periode waktu 2011 dan 2016. Variabel penjelas inti yang digunakan adalah biaya audit dan audit tenure. Ditambahkan ke variabel penjelas ini adalah kontrol untuk ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage. Teknik regresi OLS data yang dikumpulkan digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa biaya audit dan variabel penjelas lainnya menentukan 38% kualitas audit dari perusahaan yang dipilih. Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa biaya audit, profitabilitas klien dan leverage keuangan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan pada kualitas audit di sektor barang konsumen dari perusahaan yang dikutip di Nigeria. Namun, audit kepemilikan dan ukuran klien memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit di sektor barang konsumen dari perusahaan yang dikutip di Nigeria. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas audit perusahaan secara signifikan ditingkatkan oleh panjang audit dan ukuran klien, jauh lebih banyak daripada jumlah biaya audit, laba perusahaan dan leverage. Disarankan bahwa perusahaan harus mengontrak perusahaan audit selama lebih dari tiga tahun untuk mendorong kualitas laporan audit.

6. (Soliman & Elsalam, 2012) dengan judul penelitian "*Corporate Governance Practices and Audit Quality: An Empirical Study of the Listed Companies in Egypt*". Dewan Independen, CEO *duality*, dan Komite audit memiliki pengaruh signifikan dengan Kualitas audit. Sedangkan Kepemilikan institusional dan Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas audit dengan sampel 42 perusahaan Bursa Efek Mesir periode 2007-2009.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut (Rumengan, 2010) penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena alam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu dimana penulis menggunakan data berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkat. Menurut (Rumengan, 2010), penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder . Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data terhadap peneliti, misalnya harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2014).

Sumber data penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit yang dikumpulkan berdasarkan satuan waktu (data *time series* atau disebut juga data deret waktu) merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu (Umar, 2013).

Data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dari pusat referensi pasar modal Bursa Efek Indonesia perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2011 – 2018.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang tersusun di dalam arsip (Laporan Keuangan Tahunan Audit) yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2018. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.4 Populasi

Menurut (Noor, 2013), dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2018 sebanyak 38 perusahaan.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Sub Sektor	Kode	Nama Perusahaan
1	Sub Sektor Makanan dan Minuman	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
2		ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
3		CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
4		DLTA	Delta Djakarta Tbk
5		ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
6		INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
7		MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
8		MYOR	Mayora Indah Tbk
9		PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk
10		ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
11		SKBM	Sekar Bumi Tbk
12		SKLT	Sekar Laut Tbk
13		STTP	Siantar Top Tbk
14		ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry Tbk
15	Sub Sektor Rokok	GGRM	Gudang Garam Tbk
16		HMSP	HM Sampoerna Tbk
17		RMBA	Bentoel International Investama Tbk
18		WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
19	Sub Sektor Farmasi	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk
20		INAF	Indofarma (Persero) Tbk
21		KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk
22		KLBF	Kalbe Farma Tbk
23		MERK	Merck Tbk
24		PYFA	Pyridam Farma Tbk
25		SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk

26		SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
27		SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
28		SQBI	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
29		TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
30	Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga	ADES	Akasha Wira International Tbk Tbk
31		KINO	PT.Kino Indonesia Tbk
32		MBTO	Martina Berto Tbk
33		MRAT	Mustika Ratu Tbk
34		TCID	Mandom Indonesia Tbk
35		UNVR	Unilever Indonesia Tbk
36	Sub Sektor Peralatan Rumah Tangga	CINT	PT Chitose Internasional Tbk
37		KICI	Kedaung Indah Can Tbk
38		LMPI	Langgeng Makmur Industri Tbk

3.5 Sampel Penelitian

Menurut (Noor, 2013), sampel sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Subjek adalah suatu anggota dari sampel, sebagaimana elemen anggota dari populasi. Sebelum ditentukan sampel, peneliti harus menetapkan populasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non *probability Sampling* yaitu *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Adapun kriteria sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2018.
2. Perusahaan tersebut mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2018.

3. Periode laporan keuangan berakhir per 31 Desember.
4. Perusahaan memiliki struktur kepemilikan manajerial/institusional dalam struktur sahamnya.

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2018.	38
2.	Perusahaan tersebut tidak mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2018.	(19)
3.	Periode laporan keuangan tidak berakhir per 31 desember	(1)
4.	Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial/institusional dalam struktur sahamnya	(14)
Total Pemilihan Sampel		4

Menurut kriteria tersebut jumlah perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 perusahaan per tahun pada periode tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 sehingga didapatkan jumlah sampel (n) sebanyak 4×8 periode = 32 observasi. Adapun perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Perusahaan

NO.	KODE	NAMA PERUSAHAAN	SUB SEKTOR
1.	ULTJ	PT.Ultra Jaya Milk Industry Tbk	Makanan dan Minuman
2.	GGRM	PT.Gudang Garam Tbk	Rokok
3.	TCID	PT.Mandom Indonesia Tbk	Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga
4.	KICI	PT.Langgeng Makmur Industri Tbk	Peralatan Rumah Tangga

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. (Umar, 2013)

Ada 2 jenis variabel yang digunakan dala penelitian ini, yaitu variabel bebas atau variabel independen yang dinyatakan dalam simbol X dan variabel terikat atau variabel dependen yang dinyatakan dalam simbol Y.

3.6.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Sekana & Bougie, 2009). Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Kualitas Audit. Menurut (Artati, 2016), Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana auditor dapat melaporkan temuannya dengan baik atau tidak tentang adanya suatu pelanggaran yang terjadi

dalam sistem akuntansi kliennya. Tingginya kualitas audit merupakan suatu jaminan bahwa laporan keuangan telah secara tepat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kualitas audit yang tinggi meningkatkan kredibilitas laporan keuangan itu sendiri, sehingga sangatlah penting auditor untuk memperhatikan kualitas audit.

Kualitas audit diukur dengan cara *dummy* yaitu diberi nilai 1 apabila perusahaan menggunakan jasa auditor *big four* dan diberi nilai 0 apabila perusahaan menggunakan jasa auditor *non big four*. Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia yang berafiliasi dengan perusahaan audit big four adalah sebagai berikut (Arens, *et.al.*, 2008) :

- Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan *Price Waterhouse Coopers*.
- Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan *Ernst and Young*.
- Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan *Deloitte & Touche Tohmatsu*.
- Kantor Akuntan Publik Sidharta dan Widjaja berafiliasi dengan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler*.

3.6.2 Variabel Independen (X)

Menurut (Sugiyono, 2011) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau muncul variabel dependen (terikat).

3.6.2.1 Audit Tenure (X1)

Audit *tenure* merupakan variabel independen yang pertama (X_1). *Tenure* adalah lamanya masa perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. *Tenure* menjadi perdebatan pada saat *audit tenure* yang dilakukan secara singkat dan *audit tenure* yang dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama (Maharani, 2015). Variabel audit *tenure* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan dengan menghitung jumlah tahun auditor melakukan perikatan dengan perusahaan yang sama secara berturut-turut (Al-Thuneibat et al, dalam Sinaga, yang dikutip oleh (Maharani, 2015).

3.6.2.2 Rotasi Audit (X2)

Rotasi Audit merupakan variabel independen yang kedua (X_2). Myers *et al.* dalam (Ishak & Luthfi, 2011) menyatakan kewajiban rotasi auditor itu penting jika kualitas audit memburuk. Rotasi audit adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor. Rotasi audit diukur dengan menggunakan variabel dummy, 1 jika perusahaan melakukan rotasi dan 0 jika tidak melakukan rotasi.

3.6.2.3 Komite Audit (X3)

Komite Audit merupakan variabel independen yang ketiga (X_3). Menurut (Elder et al., 2011), Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggungjawabnya termasuk membantu auditor agar tetap

independen dari manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari tiga hingga lima tahun atau terkadang paling banyak tujuh direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Komite audit diukur dengan variabel *dummy* yaitu diberi nilai 1 jika perusahaan memiliki komite audit, dan diberi nilai 0 jika perusahaan tidak memiliki komite audit (Soliman & Elsalam dalam (Artati, 2016).

3.6.2.4 Kepemilikan Manajerial (X4)

Kepemilikan manajerial merupakan variabel independen yang keempat (X₄) adalah saham yang dimiliki oleh eksekutif dan direktur. Persentase kepemilikan ditentukan oleh besarnya persentase jumlah saham terhadap keseluruhan saham perusahaan. Seseorang yang memiliki saham suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan walaupun jumlah sahamnya hanya beberapa lembar saja Tuarita dalam (Artati, 2016). Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki oleh Manajemen Perusahaan}}{\text{Total Saham}}$$

3.6.2.5 Kepemilikan Institusional (X5)

Kepemilikan Institusional merupakan variabel independen yang kelima (X₅) adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Sabrinna dalam (Artati, 2016). Menurut Wening dalam Sabrina yang dikutip oleh (Artati, 2016) kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki Investor Institusi}}{\text{Total Saham}}$$

3.7 Teknik Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah teknik pengolahan data yang peneliti lakukan adalah data-data sekunder yang peneliti peroleh, kemudian dimasukkan kedalam rumus atau formula yang akan diteliti seperti berikut ini :

a. Kualitas audit diukur dengan cara *dummy* yaitu diberi nilai 1 apabila perusahaan menggunakan jasa auditor *big four* dan diberi nilai 0 apabila perusahaan menggunakan jasa auditor *non big four*. Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia yang berafiliasi dengan perusahaan audit big four adalah sebagai berikut (Elder et al., 2011) :

- Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan *Price Waterhouse Coopers*.
- Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan *Ernst and Young*.
- Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan *Deloitte & Touche Tohmatsu*.

- Kantor Akuntan Publik Sidharta dan Widjaja berafiliasi dengan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler*.
- b. *Auditor tenure* merupakan lamanya masa perikatan auditor dengan klien. Masa perikatan audit tersebut diukur dengan menghitung jumlah tahun auditor melakukan perikatan dengan perusahaan yang sama secara berturut-turut (Al-Thuneibat et al dalam Sinaga yang dikutip oleh (Maharani, 2015).
- c. Rotasi audit diukur dengan menggunakan variabel dummy, 1 jika perusahaan melakukan rotasi dan 0 jika tidak melakukan rotasi.
- d. Komite audit diukur dengan variabel *dummy* yaitu diberi nilai 1 jika perusahaan memiliki komite audit, dan diberi nilai 0 jika perusahaan tidak memiliki komite audit (Soliman & Elsalam dalam (Artati, 2016)..
- e. Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki oleh Manajemen Perusahaan}}{\text{Total Saham}}$$

- f. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki Investor Institusi}}{\text{Total Saham}}$$

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan SPSS Versi 21.0 *for windows* dengan menggunakan alat statistik regresi linier berganda dengan satu variabel terikat (Y) dan lima variabel bebas (X1,X2,X3,X4,X5).

Adapun langkah-langkah metode analisis data yang dilakukan diantaranya adalah:

3.8.1 Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2013), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Menurut (Ghozali, 2013), uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model dalam penelitian ini. Pengujian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi tidak terdapat multikoleniaritas, heterokedesitas, autokorelasi serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dalam penelitian ini diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar. Pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini antara lain:

1. Menguji normalitas data dengan membaca grafik histogram, grafik normal P-Plot dan melakukan *one sample kolmogorov smirnov*.
2. Menguji autokolerasi dengan menggunakan Uji Durbin-Waston(Statistic-d)
3. Menguji multikolinearitas dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF), dan
4. Menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* dan uji *spreman rho*'.

3.8.2.1. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2013), Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

Ho: Data residual berdistribusi normal

Ha: Data residual tidak berdistribusi normal

3.8.2.2. Uji Multikoleniaritas

Menurut (Ghozali, 2013), uji multikolenieritas adalah bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Multikolenieritas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolenieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.8.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2013), Uji heteroskedastisitas adalah bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized.

Dasar analisis :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.2.4. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2013), Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mengetahui adanya autokorelasi akan dilakukan Uji Durbin-Watson.

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag I antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

Tabel 3.4

Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No desicison	$4 - d_u \leq d \leq 4 d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber : Ghozali (2013)

3.8.3. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui model atau bentuk hubungan pengaruh antar variabel dan untuk mengetahui positif atau negatifnya pengaruh variabel *Audit Tenure*

(X1), Rotasi Audit (X2), Komite Audit (X3), Kepemilikan Manajerial (X4) dan Kepemilikan Institusional (X5) terhadap variabel terikat yaitu Kualitas Audit (Y) dimana dari sampel yang diperoleh, digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$QA = a + \beta_1 AT + \beta_2 RA + \beta_3 KA + \beta_4 KM + \beta_5 KI + e$$

Keterangan:

a : Konstanta

QA : Kualitas Audit

AT : Audit *Tenur*

RA : Rotasi Audit

KA : Komite Audit

KM : Kepemilikan Manajerial

KI : Kepemilikan Institusional

e : *Error*

3.8.4 Uji Hipotesa

3.8.4.1. Uji Parsial (Uji T)

Menurut (Priyatno, 2012), Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Prosedur pengujiannya sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$$H_0 : b_1 = 0$$

Artinya Audit Tenure, Rotasi Audit, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

$$H_a : b_1 \neq 0$$

Artinya Audit Tenure, Rotasi Audit, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

2. Menentukan taraf signifikansi

Taraf signifikansi menggunakan 0.05

3. Menentukan T hitung dan T tabel

Nilai T tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi $0.05/2 =$

0.025 (uji 2 sisi) $df_1 = n - k - 1$ $df_2 = n - k$ (k adalah jumlah variabel)

4. Pengambilan keputusan

$T \text{ hitung} \leq T \text{ tabel}$ atau $-T \text{ hitung} \geq -T \text{ tabel}$ jadi H_0 diterima

$T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ atau $-T \text{ hitung} < -T \text{ tabel}$ jadi H_0 ditolak

Pengambilan keputusan berdasar signifikansi adalah sebagai berikut :

Signifikansi > 0.05 jadi H_0 diterima

Signifikansi ≤ 0.05 jadi H_0 ditolak

3.8.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Menurut (Priyatno, 2012), uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Prosedur pengujiannya sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternative

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$$

Artinya Audit *Tenure*, Rotasi Audit, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$$

Artinya Audit *Tenure*, Rotasi Audit, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

2. Menentukan taraf signifikansi

Taraf signifikansi menggunakan 0.05

3. Menentukan F hitung dan F tabel

Nilai F tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi 0.05 $df_1 = k - 1$
 $df_2 = n - k$ (k adalah jumlah variabel)

4. Pengambilan keputusan

F hitung \leq F tabel jadi H_0 diterima

F hitung $>$ F tabel jadi H_0 ditolak

Pengambilan keputusan berdasar signifikansi adalah sebagai berikut :

Signifikansi $>$ 0.05 jadi H_0 diterima

Signifikansi \leq 0.05 jadi H_0 ditolak

3.8.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Priyatno, 2012), koefisien determinasi adalah digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 mempunyai interval anatar 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut. Dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan varabel dependen.

3.9. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Tempat dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2018, sedangkan waktunya direncanakan dimulai dari penyusunan usulan penelitian sampai terselesaikannya laporan penelitian, yakni dimulai pada bulan Mei 2017 sampai dengan April 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2011). Analisis Sistem Insentif dalam Manajemen Perusahaan. *Jurnal Benefita Februari*, 1(6).
- Alim. (2017). Analisis Kualitas Audit Berdasarkan Akuntabilitas dan Independensi Auditor. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*2, 1(3).
- Arifin. (2012). *Leadership*. Jakarta.
- Artati. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Periode 2012-2014 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(2).
- Brigham, & Houston. (2008). Analysis of Decision Maker by Company Manager. *Journal of Administration and Business Knowledge*, 1(8).
- Dewi, S. C. (2018). *Keterlibatan Institusional dalam Kepemilikan Saham*. Jakarta: KDT.
- Dita, N. H. (2012). Analisis Pengaruh harga, Produk, Kebersihan, dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Restoran Mamamia Cabang Mrican). *Jurnal COA Lovenia*, 1(1).
- Elder, R. J., Beasley, M. S., Arens, A. A., & Jusuf, A. A. (2011). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan (Adaptasi Indonesia)*. (F. Febriand, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21* (Edisi ketu). Semarang: Universitas Diponegoro.

- Giri. (2010). Pengaruh Rekomendasi dari Manajemen terhadap Kemampuan Akutual pada Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 2(5).
- Gumantri. (2017). Analisis Mekanisme Pengawasan Dalam Meminimalisir Agency Conflict. *Jurnal EBBANK*, 1(8).
- Hall, & Singleton. (2009). The Influence of Audit Tenure on Company Assembly. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (Akmenbis)*, 2(9).
- Hardjanti, S. (2011). *Independensi Auditor dalam Kualitas Audit*. Jakarta: LAKSANA.
- Hartadi. (2012). Pengaruh Audit Tenure terhadap Waktu Auditor pada Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Lingua Cultura*, 2(3).
- Hartono, & Nugrahanti. (2014). Pengaruh Komisaris Audit terhadap Komisaris Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(10).
- Ilechukwu, & Ubaka, F. (2017). Pengaruh Biaya Audit terhadap Kualitas Audit Perusahaan terdaftar di Nigeria. *Jurnal Akuntansi Biaya*, 3(4).
- Ishak, A., & Luthfi, Z. (2011). Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas: Studi Tentang Peran Mediasi Switching Cost. *Siasat Bisnis*, 15(1). [https://doi.org/ISSN: 1512-1015](https://doi.org/ISSN:1512-1015)
- Juanidi, & Jogiyanto. (2010). Pengaruh Audit Tenure terhadap Lama Hubungan Auditor dan Klien pada Kantor Akuntan Publik, 2(6).
- Junaidi, & Nurdiono. (2016). Analisis Audit Tenure. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)*, 1(10).
- Kartika, N. (2017). *Penetapan Dividen dalam Kepemilikan Manajerial*. Jakarta: Ekonesia.

- Kurniasih, M., & Rohman, A. (2014). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(2).
- Kusumawati, V. (2011). *Tingkat Kepemilikan Institusional*. Jakarta: In Media.
- Luciana, S., Almiliadan, Meliza, S., & Meliza. (2017). *Konflik Keagenan dalam Kepemilikan Manajerial*. Jakarta: DEEPUBLISH.
- Maharani. (2015). Pengaruh Audit Tenure, Audit Fee dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Indonesia Tahun 2011-2013). *Jurnal JIBEKA Volume 11 No. 1 Agustus 2017*, 2(1).
- Mardisar. (2017). Analisis Akuntabilitas Auditor. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(4).
- Margi, & Rochman. (2014). Analisis Rotasi yang bersifat Mandatory. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (Akmenbis)*, 1(1).
- Maulana, F. H., Hamid, D., & Mayoan, Y. (2015). Pengaruh Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank BTN Kantor Cabang Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 22(1), 1–8.
- Nasution, D. (2013). Ketergantungan Biaya Audit, masa kerja auditor, dan auditor independensi : kasus finlandia. *Jurnal Akuntansi Ketergantungan*, 3(3).
- Noor. (2013). *Hipotesis dalam Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Media Kom.
- Nuratama. (2011). Pengaruh Audit Tenure terhadap Independensi Auditor pada

- Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 2(2).
- Patricia, M. (2014). *Kinerja dalam Kepemilikan Institusional*. Jakarta: Harvarindo.
- Pearce, & Robinson. (2008). The Influence of Audit Tenure and Audit Committee on Independence Director. *Journal Turnover*, 2(8).
- Priyatno, D. (2012). *Cara Kiat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20.0*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Rahayu, & Suhayati. (2013). Pengaruh Audit Tenure dan Komite Audit terhadap Independensi Auditor pada Perusahaan. *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta*, 2(7).
- Rohman. (2014). Pengaruh Audit Tenure terhadap Rotasi Audit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(5).
- Rumengan, J. (2010). *Metodelogi Penelitian dengan SPSS*. Batam: Uniba Press.
- Sartono. (2010). *Kiat-Kiat Meminimalisis Konflik Keagenan*. Jakarta: Agung Medi.
- Sekan, & Bougie. (2009). *Definisi Operasional Variabel dalam Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siagian. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. (2014). *Manajemn Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Simanjuntak. (2011). *Kinerja Organisasi Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Siregar, S. (2014). *Statistik Paramterik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soliman, & Elsalam. (2012). Corporate Governance Practices and Audit Quality: An Empirical Study of the Listed Companies in Egypt. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*2, 3(1).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Susiana, & Herawaty. (2017). *Tujuan dibentuknya Komite Audit*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tandiontong. (2016). Analisis Agency Theory dalam Implementasinya pada Organisasi Modern. *Jurnal Computech & Bisnis*, 1(7).
- Tarigan, Josua, & Chistiawan, Y. Y. (2017). *Kepemilikan Manajerial*. Jakarta: C.V Andi Offset.
- Tempo. (2008, May 11). Masa Pembekuan Izin Akuntan. *PT. Info Media Digita*.
- Umar, H. (2013). *Jenis dan Sumber Data dalam Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Pearson Education.Inc.
- Utami, & Sirajuddin. (2013). Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Maksipreneur*, 2(4).
- Widarjo, W. (2010). *Kepemilikan Institusional*. Jakarta: First Draft KMPK Universitas Gadjah Mada.
- Widiastuti, P. P., Midiastuty, & Suranta, E. (2013). *Kepemilikan Saham dalam Kepemilikan Institusional*. Jakarta: Gava Media.

CURRICULUM VITAE



Nama : Dewi Oktaviani

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Oktober 1993

Agama : Islam

Alamat : Jl.Sukamaju Perum Citra Pelita 1 No 28

Nomor Handphone : 0852 6346 5184

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 004 Tanjungpinang Timur
: SMP Negeri 12 Tanjungpinang
: SMK Negeri 1 Tanjungpinang
: STIE Pembangunan Tanjungpinang

Riwayat pekerjaan : PT.Malaka Abadi Tanjungpinang
(Yamaha Malaka Abadi)